

PENERAPAN PRINSIP E-GOVERNMENT DALAM PEMERINTAHAN DESA MELALUI APLIKASI GIGADES SEBAGAI PENGGERAK TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Vivin Delvya Roza¹

¹Magister Ilmu Administrasi Publik/Universitas Riau

¹Pekanbaru-Riau Indonesia

Email: vivindelvyaroza070101@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the lack of contact, knowledge and technology between villages and cities which has an impact on the slow implementation of village government. Because of this situation, it is difficult for society to be fully involved in the contemporary digital era. By using applications to form electronic-based government, the aim of e-governance is to encourage better, more effective and efficient village development. However, e-Government has not been implemented in villages according to the plans that have been set at this stage. This is caused by the community's low digital awareness and the village government's organizational structure and culture not being ready to fully adopt digitalization in the administration of village government. This study aims to analyze the application of E-Government Principles in Village Government Through the GigaDes Application as a Driver of Digital Economic Transformation. This study uses best practicesGraham's theory. This study uses a qualitative research method that is explanatory that uses data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of village government in Kuantan Singingi Regency has been carried out through E-government breakthroughs in the form of innovations in the form of applications and websites Gigades.id. However, the application of the principle of e-government in village government through the Gigades application is considered not good enough because it was found that there were still features that should have been accessible to the public but it turned out that until now they could not be accessed.

Keywords: Applications and Websites, E-government, Government Administration

Abstraksi

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Minimnya kontak, pengetahuan, dan teknologi antara desa dan kota yang berdampak pada lambannya pelaksanaan pemerintahan desa. Karena keadaan ini, masyarakat sulit untuk terlibat sepenuhnya di era digital kontemporer. Dengan menggunakan aplikasi untuk membentuk pemerintahan berbasis elektronik, tujuan dari e-governance adalah mendorong pembangunan desa yang lebih

baik, efektif, dan efisien. Namun, e-Government belum diterapkan di desa-desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada tahap ini. disebabkan oleh rendahnya kesadaran digital masyarakat serta belum siapnya struktur organisasi dan budaya pemerintah desa untuk sepenuhnya mengadopsi digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Prinsip E-Government Dalam Pemerintahan Desa Melalui Aplikasi GigaDes Sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi Digital di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan teori best practice dari Graham. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif dengan pendekatan fenomenologi yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan terobosan E-government berupa inovasi dalam bentuk aplikasi dan website Gigades.id. Namun penerapan prinsip e-government dalam pemerintahan desa melalui aplikasi gigades di kabupaten kuantan singingi dinilai belum cukup baik karena ditemukan masih ada fitur yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat namun ternyata sampai sekarang belum bisa diakses. Kemudian kriteria inklusif karena ditemukan sampai sekarang masih ada kendala jaringan yang belum bisa diatasi oleh pemerintah dan pihak ketiga.

Kata Kunci: *Aplikasi dan Website ,E-government, Penyelenggaraan Pemerintahan*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan unit administratif fundamental yang berperan vital dalam struktur pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu canggih, khususnya dalam era *Society 5.0*, terjadi transformasi paradigma dalam tata kelola pemerintahan di semua tingkatan. Pemanfaatan teknologi digital telah menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif, mulai dari tingkat pemerintah pusat, daerah, hingga unit pemerintahan desa. Transformasi digital ini memungkinkan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administratif, dan membangun sistem tata kelola yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer, sekaligus menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat dalam era digital.

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan secara kontinu dan dapat mewujudkan reformasi birokrasi yang ideal yaitu penerapan sistem dan mekanisme pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi atau dikenal dengan *electronic government (e-government)*. Penerapan *e-government* merupakan salah satu instrument pendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Pemerintahan berbasis elektronik diatur dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Tujuan dibentuknya Inpres tersebut adalah agar pemerintahan elektronik dapat berkembang dengan pesat, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah [10].

Implementasi website dan aplikasi GigaDes merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya menciptakan E-government di tingkat pemerintahan desa. Melalui kolaborasi strategis dengan PT Phoenix, inovasi teknologi ini secara resmi diluncurkan pada 15 februari 2021 menandai babak baru dalam modernisasi tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Platform digital ini tidak hanya berfungsi sebagai portal informasi, tetapi juga memfasilitasi berbagai layanan publik dan administrasi pemerintahan. fitur yang ditawarkan dalam inovasi penyelenggaraan pemerintahan desa Gigades.id berupa layanan surat online, pengumuman desa, transparansi dana desa, penjualan produk desa, kolom aspirasi desa, infografik desa dan termasuk fitur AI Pembuat Artikel Berita Desa Otomatis. Fitur AI ini dirancang untuk membantu perangkat desa dalam membuat dan menyebarkan artikel berita terkait perkembangan di desa mereka secara otomatis. Berikut tampilan aplikasi gigades tersaji pada gambar 1.

Gambar 1. Tampilan Beranda Versi 1 Gigades.id dalam bentuk Aplikasi



Sumber : Aplikasi Gigades.id (Gigades.id di akses 6 November 2024)

Dari gambar 1 tersebut dapat kita lihat tampilan aplikasi Gigades.id diaplikasi handphone, aplikasi Gigades.id merupakan inovasi penyelenggaraan pemerintahan versi pertama yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pemerintahan desa. Masyarakat bisa mengunduh aplikasi desa tersebut di android dan ios dengan nama desa masing-masing yang telah menjadi mitra perusahaan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 3 desa yang sudah menjadi mitra Gigades.id yang dirancang oleh perusahaan phoenix yaitu Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah, Desa Toar Kecamatan Gunung Toar, Desa Koto Benai Kecamatan Benai. 3 desa tersebut merupakan desa yang pertama, kedua dan ketiga bergabung menjadi mitra Gigades.id. Oleh karena itu, 3 desa tersebut sudah memiliki catatan perjalanan yang lebih banyak dari pada desa lainnya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 3 desa tersebut, agar peneliti mengetahui bagaimana innovative governance dalam penyelenggaraan pemerintah di desa.

Namun dalam pelaksanaannya masih muncul beberapa permasalahan sebagai berikut: Pertama, Kesadaran digital (*Digital awerness*) masyarakat yang masih rendah. Hal ini diakibatkan karena faktor pendidikan yang ada di desa, budaya yang berkembang

dikalangan masyarakat dan faktor usia. Hal ini dapat dilihat dari data perbandingan antara masyarakat yang menggunakan pelayanan melalui aplikasi dan website Gigades.id tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Data Perbandingan Pelayanan Berbasis Konvensional dan Digital Gigades.id dari Januari- Agustus 2024

No.	Nama Desa	Kecamatan	Konvensional	Digital
1.	Pulau Banjar Kari	Kuantan Tengah	83 Surat	15 Surat
2.	Toar	Gunung Toar	52 Surat	8 Surat
3.	Koto Benai	Benai	61 Surat	10 Surat
Jumlah Surat			192 Surat	33 Surat

Sumber : Pemerintah Desa Pulau Banjar Kari, Desa Toar dan Desa Koto Benai

Dari tabel 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan berbasis konvensional masih tinggi di bandingkan pelayanan berbasis digital. Peneliti melihat di tiga desa sebagai tempat penelitian, dengan data informasi masyarakat di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah dari bulan Januari hingga Agustus yang mengakses layanan surat berbasis konvensional sebanyak 83 surat, sedangkan layanan secara digital hanya 15 surat. Masyarakat di Desa Toar Kecamatan Gunung Toar yang mengakses layanan berbasis konvensional sebanyak 52 Surat, sedangkan layanan secara digital hanya sebanyak 8 surat. Masyarakat Desa Koto Benai Kecamatan Benai yang mengakses layanan berbasis konvensional sebanyak 61 surat, sedangkan layanan secara digital yang diakses masyarakat hanya 10 surat. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya tingkat pemahaman digital di masyarakat Desa Pulau Banjar Kari, Desa Toar dan Desa Koto Benai.

Struktur organisasi dan budayanya belum sepenuhnya siap, itulah persoalan kedua. Hal ini bisa dilihat dari masih rendahnya pemahaman pemerintah desa terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis digital. Budaya organisasi gagal berkembang menjadi budaya inovatif karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Fitur sistem organisasi masih belum memadai untuk mendukung dan bereaksi secara cepat terhadap setiap perubahan layanan dan inovasi yang terjadi. hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan perangkat desa Pulau Banjar Kari tamatan SMA 5 orang, dan S1 2 orang, perangkat desa Toar tamatan SMA 10 dan S1 3 orang, perangkat desa Koto Benai tamatan SMA 4 orang dan S1 2 orang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perangkat desa masih di dominasi oleh perangkat desa yang tingkat pendidikan masih SMA. Akibatnya pengetahuan perangkat desa juga masih rendah dan berpengaruh pada budaya organisasi yang belum sepenuhnya siap mengikuti perkembangan inovasi.

Permasalahan ketiga adalah belum adanya regulasi spesifik di tingkat kabupaten yang mengatur tentang standar keamanan dan privasi data dalam implementasi sistem elektronik di tingkat desa, Sebagai platform digital yang mengelola data sensitif dari 229 desa di wilayah Kuantan Singingi, GigaDes menghadapi tantangan dalam mengamankan

berbagai informasi strategis, mulai dari data kependudukan, informasi aset desa, hingga transaksi keuangan desa. Kompleksitas pengelolaan data semakin meningkat mengingat karakteristik geografis Kuantan Singingi yang luas, dengan titik terjauh mencapai wilayah Cerenti dan Pucuk Rantau, yang berimplikasi pada kebutuhan sistem pengamanan data yang mampu mengakomodasi akses dari berbagai lokasi tanpa mengorbankan aspek keamanan. Kolaborasi dengan PT Poenix sebagai mitra teknologi dalam pengembangan GigaDes juga menimbulkan pertanyaan seputar mekanisme pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengamanan data, terutama berkaitan dengan hak akses, prosedur backup data, serta protokol penanganan insiden keamanan.

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip e-government dalam pemerintahan desa melalui aplikasi Gigades di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batasan pada tiga desa yang menjadi lokasi studi, yaitu Desa Pulau Banjar Kari, Desa Toar, dan Desa Koto Benai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aplikasi Gigades dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong transformasi ekonomi digital di tingkat desa. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman tentang penerapan e-government dalam konteks pemerintahan desa, serta memberikan wawasan mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi teknologi digital di lingkungan pemerintahan desa, yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada tingkat pemerintah kota atau kabupaten.

2. TINJAUAN PUSTAKA

E-Government merupakan cara baru bagi pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya. Ia memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet, untuk meningkatkan kualitas layanan. Pada dasarnya ide utamanya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan hubungan pemerintah dengan berbagai entitas, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lainnya [1].

Prinsip yang mendasari *e-government* menurut Graham [2], Pelayan pemerintah harus berorientasi pada warga masyarakat, yang berarti bahwa pelayanan yang diberikan dengan cara yang masuk akal dan berpihak sehingga warga merasa bahwa mereka diberikan pelayanan. Pelayanan pemerintah harus dapat diakses, yang berarti bahwa semua jenis layanan elektronik seperti yang diakses melalui internet, telepon genggam, komputer, dan sebagainya harus dapat diakses dengan mudah atau tanpa kesulitan. Pelayanan pemerintah harus inklusif yang berarti bahwa setiap layanan yang tersedia harus tetap diperbarui dan ditingkatkan agar dapat digunakan oleh semua orang di masyarakat. Pengelolaan informasi berarti bahwa pemerintah hanya memberikan informasi yang logis, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan sehingga informasi tersebut memiliki nilai.

E-Government dapat meningkatkan efektivitas biaya, kecepatan operasional, akuntabilitas, transparansi, dan interaksi antara pemerintah dan konstituenya, termasuk warga negara, perusahaan, dan organisasi sektor ketiga (long & Phillips, 2023)[3]. Pemerintah bertugas memberikan informasi tentang berbagai kegiatan pemerintahan yang sedang berlangsung di bawah e-Government, yang merupakan suatu bentuk reformasi atau paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada transparansi informasi publik [4]. Menurut definisi Bank Dunia (2004), e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh organisasi yang dapat mendorong komunikasi antara individu, bisnis, dan lembaga pemerintah [5].

Infrastruktur teknologi, yang mencakup pusat data yang kuat, perangkat keras dan perangkat lunak yang canggih, jaringan komunikasi yang kuat, dan sistem keamanan informasi yang efisien, merupakan salah satu elemen kunci SPBE [6]. Penciptaan dan penyampaian layanan publik elektronik, seperti aplikasi dan portal pemerintah, yang memungkinkan masyarakat umum mengakses informasi dan melakukan prosedur manajemen secara online. Pejabat pemerintah dapat meningkatkan layanan masyarakat dan meningkatkan keterbukaan layanan dengan mempublikasikan melalui layanan informasi publik, yang merupakan dua dari banyak keuntungan e-Government [7]. Selain kualitas sistem informasi, kondisi masyarakat setempat juga harus menjadi pertimbangan dalam penerapan e-Government [8]. *E-Government* dapat disimpulkan adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government merupakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat secara efektif dan efisien.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada *e-government*. Jika penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penerapan *e-government* ditingkat pemerintah kota atau kabupaten dengan sistem yang kompleks, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan *e-government* dalam skala yang lebih mikro yaitu pemerintah desa melalui sebuah aplikasi Gigades. Keunikan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip *e-government* dengan transformasi digital ekonomi desa, dimana aplikasi Gigades tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja pemerintahan tetapi juga berperan sebagai katalisator pengembangan ekonomi digital di tingkat desa. Selain itu, berbeda dengan studi terdahulu yang umumnya hanya membahas aspek administratif dan pelayanan publik, penelitian ini menekankan pada bagaimana prinsip *e-government* dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dipilih dalam penelitian

ini untuk menggali secara mendalam pengalaman pengguna dan pemangku kepentingan terkait penerapan E-Government melalui aplikasi Gigades di Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan persepsi individu terhadap fenomena yang diteliti, dalam hal ini, bagaimana masyarakat desa merasakan dan berinteraksi dengan aplikasi E-Government. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat studi kasus dikarenakan penelitian terkait penerapan prinsip e-government melalui sebuah aplikasi pelayanan di bidang ilmu administrasi publik di Indonesia masih minim ditemui. Peneliti menerapkan Teori Graham dalam konteks penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip *e-government* dalam pemerintahan desa melalui aplikasi Gigades di Kabupaten Kuantan Singingi. Prinsip-prinsip yang mendasari e-Government menurut Graham, seperti yang berorientasi pada warga masyarakat, aksesibilitas, dan inklusivitas dan pengelolaan informasi menjadi kerangka acuan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian adalah di 3 (Tiga) desa, yaitu Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah, Desa Toar Kecamatan Gunung Toar, Desa Koto Benai Kecamatan Benai di Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti memilih informan penelitian melalui teknik *purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu tersebut dianggap orang yang paling menguasai sehingga memudahkan peneliti mengetahui objek atau situasi dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui hasil wawancara observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap informan untuk memperoleh informasi dan data mengenai penerapan *e-governmnet* melalui aplikasi gigades. Peneliti melakukan wawancara secara bertahap berdasarkan urutan informan yang sudah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat penerapan prinsip e-government melalui aplikasi gigades di lokasi penelitian, sehingga peneliti dapat melihat kondisi nyata dilapangan. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah, Desa Toar Kecamatan Toar dan Desa Koto Benai Kecamatan Benai. Observasi dilakukan melalui pengamatan yang dilakukan pada saat yang bersamaan dengan proses wawancara terkait penerapan prinsip *e-government* melalui aplikasi gigades. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan data-data tertulis dari media online yaitu berita tentang Aplikasi dan Webiste Gigades.id di Kabupaten Kuantan Singingi: yang dipublish di website kompasiana.com dan Kuansing.go.id. Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi dalam bentuk rekaman suara informan, foto-foto mengenai kondisi kantor desa, dan kegiatan penyelenggaraan pemerintaha desa.

Teknik analisa data yang diterapkan pada penelitian ini merupakan teknik analisis data yang berasal dari [9]. Dalam penelitian ini, tahapan analisis data dilakukan dengan mengikuti metode yang dikembangkan mencakup beberapa langkah penting seperti

analisis dan penerapan teori Graham. Pertama, *plan* dilakukan untuk mengidentifikasi perkembangan inovasi penyelenggaraan pemerintahan desa di era yang serba digital, kemudian *desaign* untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, selanjutnya *prepare* yakni melakukan pembuatan dan pengembangan tata cara penelitian, kemudian *collect* yakni mengorganisir data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola dan kategori yang relevan. Selanjutnya, peneliti melakukan identifikasi berdasarkan hasil organisir tersebut, yang memungkinkan peneliti untuk menemukan permasalahan utama yang berkaitan dengan penerapan prinsip e-government dalam konteks aplikasi GigaDes dan kemudian di share melalui tulisan penelitian. Dalam proses ini, teori Graham diterapkan sebagai kerangka acuan untuk mengevaluasi data, dengan fokus pada kriteria-kriteria seperti aksesibilitas, inklusivitas, dan orientasi pada masyarakat. Dengan demikian, analisis data tidak hanya menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman pengguna dan pemangku kepentingan, tetapi juga memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-government di tingkat desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan e-government di pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Melalui digitalisasi berbagai layanan, diharapkan dapat mempercepat proses, mengurangi birokrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintah. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pada bab ini, penulis akan menganalisis data-data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapat selama penelitian terkait dengan penelitian ini yaitu penerapan prinsip e-government dalam pemerintahan desa melalui aplikasi gigades sebagai penggerak transformasi ekonomi digital di kabupaten kuantan singingi. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang temuan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi pada penerapan aplikasi dan website Gigades.id:

4.1. Beorientasi Kepada Masyarakat

Memprioritaskan tujuan dalam meningkatkan layanan publik memerlukan penerapan *e-government* yang efektif. Proses peralihan dari sistem lama ke era digital membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mulai dari penganggaran, penyediaan infrastruktur dan fasilitas, sumber daya manusia, dan edukasi masyarakat tentang e-Government dalam rangka menjamin fasilitas pelayanan pemerintah. Penerapan aplikasi Gigades.id di Kabupaten Kuantan Singingi sudah memberikan dampak berupa manfaat atau nilai positif terhadap penyelenggaraan pemerintah desa berupa manfaat dalam pelayanan, internal pemerintah, ekonomi dan lingkungan.

Hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat memperoleh pelayanan administrasi yang mereka perlukan. Prosedur pelayanan dalam administrasi pemerintahan desa dibuat

sederhana, seperti penggunaan Gigades.id dan aplikasi tunggal layanan administrasi masyarakat, sehingga tidak perlu lagi datang langsung ke kantor. Selain itu, ketersediaan teknologi memudahkan warga dalam memperoleh layanan informasi, seperti berita desa, pengumuman, dan informasi lainnya. Fungsi *marketplace* pada aplikasi Gigades.id memberikan keuntungan ekonomi dengan memungkinkan masyarakat melakukan transaksi jual beli online. Fitur ini berpotensi mentransformasi perekonomian masyarakat setempat menjadi lebih maju. Produk jual beli yang ada dalam aplikasi gigades adalah Bumdes air galon unggulan, Kerupuk sagu mentah, Kerupuk Sagu, Ikan Nila, Ikan Rayo, Kedai Harian Dhuha, Kerbau, Sapi, Kambing dan Bumdes Gilingan Padi Keliling. Sehingga dengan melihat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat disimpulkan bahwa aplikasi gigades dibuat oleh pemerintah desa Kabupaten Kuantan Singingi dengan berfokus pada orientasi kepada masyarakat.

4.2. Dapat Diakses

Pelayanan pemerintah harus dapat diakses, maksudnya yaitu bahwa semua jenis pelayanan yang diberikan secara elektronik, baik itu melalui internet, telepon genggam, komputer, dan lain sebagainya, harus dapat diakses dengan mudah atau tanpa perlu bersusah payah. Dalam Penerapan Prinsip *e-government* dalam pemerintahan desa melalui aplikasi gigades di Kabupaten Kuantan Singingi, aplikasi dan website gigades dapat diakses oleh masyarakat melalui internet baik dengan menggunakan smartphone maupun ios. Masyarakat Desa Pulau Banjar Kari, masyarakat desa Toar dan masyarakat Koto Benai ikut berpartisipasi aktif dalam pada penerapan aplikasi Gigades.id.

Hal ini dapat dilihat dari terdapat 6 (enam) fitur dalam aplikasi dan website Gigades.id untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Fitur-fitur tersebut aktif dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa semenjak aplikasi dan website Gigades.id di terapkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kecuali fitur transparansi dana desa yang hanya bisa diakses oleh pemerintah desa. Padahal Hak masyarakat untuk mengakses informasi tentang pengelolaan dana desa juga sudah diatur dalam Pasal 68 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa harus berdasarkan pada transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah kepada masyarakat, hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut, dan pengoperasian dana desa dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat desa yang kemudian akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemerintah desa menerapkan aplikasi Gigades.id adalah untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses layanan yang dibutuhkan, Namun tidak semua masyarakat dapat berpartisipasi aktif karena kondisi usia serta pemahaman masyarakat desa yang masih rendah terhadap perkembangan teknologi. Bahkan data dari BPS mencatat, penduduk Indonesia yang menguasai teknologi pada tahun 2020 tercatat sebanyak 70,17%. Rinciannya, hanya

49.77% penduduk di pedesaan yang sudah menguasai teknologi, sementara penduduk di perkotaan memiliki persentase , yaitu 73,51%.

4.3. Inklusif

Pelayanan pemerintah harus inklusif, artinya adalah setiap pelayanan yang tersedia harus terus diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat digunakan oleh setiap elemen masyarakat tanpa terkecuali. Secara garis besar, pemerintah telah memberikan pelayanan melalui aplikasi gigades secara baik. Dalam perkembangannya, inovasi dalam bentuk sistem aplikasi di versi pertama tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat desa. Hal ini terjadi karena kualitas penyimpanan smartphone masyarakat desa yang masih rendah, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh tidak dapat mengunduh aplikasi tersebut. Pada tahun 2022, akhirnya PT.Phoenix kembali bertransformasi untuk menciptakan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pada tahun tersebut PT.Phoenix mengembangkan lagi aplikasi desa ke versi kedua yang dikenal dengan nama aplikasi dan website Gigades.id. semua desa yang menjadi mitra sudah berada dalam satu pintu inovasi desa. Dalam artian bahwa website Gigades.id ini dapat digunakan oleh semua desa, sedangkan aplikasi Gigades.id versi pertama hanya dapat digunakan oleh satu desa saja.

Dalam penerapan prinsip E-Government melalui aplikasi dan website Giagdes.id di Kabupaten Kuantan Singingi, masih terdapat kendala dalam kualitas jaringan internet. kualitas jaringan internet beberapa desa di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum memadai salah satunya yang di alami oleh pemerintah dan masyarakat di Desa Toar. Dalam artian bahwa kuliatas internet yang ada di Indonesia masih rendah, ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintah khususnya pemerintah desa pada penerapan prinsip *e-government* desa. dalam penerapan prinsip e-governmant melai aplikasi Gigades di Kuantan Singingi juga belum adanya regulasi spesifik di tingkat kabupaten yang mengatur tentang standar keamanan dan privasi data dalam implementasi sistem elektronik di tingkat desa, Sebagai platform digital yang mengelola data sensitif dari 229 desa di wilayah Kuantan Singingi, GigaDes menghadapi tantangan dalam mengamankan berbagai informasi strategis, mulai dari data kependudukan, informasi aset desa, hingga transaksi keuangan.

4.4. Pengelolaan Informasi

Agar semua informasi tersebut bernilai, pengelolaan informasi berarti pemerintah hanya menyebarkan informasi yang dapat dimengerti, logis, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan. Tampilan website Gigades.id sangat lugas, mudah dipahami, dan sesuai dengan konteks lokal dengan menggunakan konsep E-Government. Gigades.id memberikan fitur tambahan yang lebih dibutuhkan oleh daerah pedesaan. Pihak perusahaan sudah membuat aplikasi dan website Gigades.id dengan menyesuaikan kondisi masyarakat desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah desa dan

perusahaan memastikan bahwa aspek budaya tetap ada dalam tatanan desa sehingga antara konteks lokal dan modernisasi tidak saling berlawanan. Tradisi yang paling kental dengan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi seperti moment pacu jalur, maka dengan inovasi desa yang dimiliki masyarakat dan pemerintah desa dapat mengakses layanan live streaming yang disediakan dalam aplikasi Gigades.id.

Penerapan aplikasi dan website Gigade.id berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa Indonesia khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan Gigades.id berkembang dengan baik dan diadopsi oleh beberapa daerah di Kabupaten Kampar. Inovasi ini juga menawarkan fitur serta fisibilitas yang baik sehingga layak diterapkan pada daerah lain tanpa mengubah atau mengganggu karakteristik kelokalan yang telah ada. Terbukti dari data bahwa telah banyak daerah yang menjadi mitra didalam dan diluar pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.

Rekomendasi untuk perbaikan implementasi aplikasi Gigades di Kabupaten Kuantan Singingi mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, peningkatan kualitas jaringan internet di desa-desa yang masih mengalami kendala, sangat penting untuk memastikan aksesibilitas aplikasi oleh seluruh masyarakat. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperbaiki infrastruktur jaringan. Kedua, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai standar keamanan dan privasi data dalam implementasi sistem elektronik di tingkat desa, untuk melindungi data sensitif yang dikelola oleh aplikasi Gigades. Ketiga, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai penggunaan aplikasi dan fitur-fitur yang tersedia juga diperlukan, agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan aplikasi secara maksimal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi Gigades dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan temuan dalam jurnal ini, terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya mengenai penerapan E-Government di desa. Penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan E-Government dalam skala yang lebih mikro, yaitu di tingkat pemerintahan desa melalui aplikasi Gigades, sementara studi sebelumnya lebih berfokus pada penerapan E-Government di tingkat pemerintah kota atau kabupaten dengan sistem yang lebih kompleks. Selain itu, penelitian ini menekankan integrasi prinsip E-Government dengan transformasi digital ekonomi desa, di mana aplikasi Gigades tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja pemerintahan, tetapi juga sebagai katalisator pengembangan ekonomi digital di tingkat desa. Sementara itu, studi-studi sebelumnya umumnya hanya membahas aspek administratif dan pelayanan publik tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi digital secara menyeluruh.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis teori E-government menurut Graham (dalam Amy Y.S 2020:238) penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan terobosan E-government berupa inovasi dalam bentuk aplikasi dan website Gigades.id. Namun penerapan prinsip e-government dalam pemerintahan desa melalui aplikasi gigades di kabupaten kuantan singingi dinilai belum cukup baik karena masih terdapat kriteria yang belum memenuhi prinsip E-government menurut Graham seperti kriteria dapat diakses karena ditemukan masih ada fitur yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat namun ternyata sampai sekarang belum bisa diakses. Kemudian kriteria inklusif karena ditemukan sampai sekarang masih ada kendala jaringan yang belum bisa diatasi oleh pemerintah dan pihak ketiga.

Terdapat faktor penghambat dalam Penerapan Prinsip E-Government Dalam Pemerintahan Desa Melalui Aplikasi GigaDes di Kabupaten Kuantan Singingi yakni, kendala jaringan dan sistem yang belum maksimal. sehingga pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi masih perlu melakukan analisis dan pembenahan pada penerapan inovasi digital desa untuk mengoptimalkan penerapan Gigades.id. Pentingnya perbaikan dalam penerapan e-Government di desa tidak dapat diabaikan, karena hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan desa yang lebih efektif dan efisien dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Imran S, I. S. (2020). *Implementasi Ajamma (Ajang Aspirasi Masyarakat Makassar) Melalui E- Government Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik DPRD Di Kota Makassar*
- [2] Rahayu, Amy. Vishu Juwono. dan Krisna Puji Rahmayanti. 2020. *Pelayanan Publik dan E-Government: Sebuah Teori dan Konsep*. Depok. Rajawali Pers. Jakarta: Salemba Humanika
- [3] Iong, K. Y., & Phillips, J. O. L. (2023). *The transformation of government employees behavioural intention towards the adoption of E-government services: An empirical study*. Social Sciences & Humanities Open, 7(1), 100485
- [4] Lenak, S. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). *Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon*. *Governance*, 1(1).
- [5] Alia, S., Umam, K., & Putri, C. A. (2023). *E-Government: Electronic Government (Untuk Mahasiswa & Praktisi)*

- [6] Distel, B., & Lindgren, I. (2023). *A matter of perspective: Conceptualizing the role of citizens in E-government based on value positions*. *Government Information Quarterly*, 40(4), 101837
- [7] Batubara dan Helmy. (2019). *Analisis pengembangan electronic government melalui penyelenggaraan website di pemerintahan daerah kabupaten padang pariaman* (Vol. 1, Issue 4).
- [8] Wargadinata, E. (2021). *Hubungan Dan Peran Pemangku Kepentingan Pogram Smart-Kampung Kabupaten Banyuwangi*.
- [9] Yin, Robert. K. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods* (Sixth Editions). Singapore: SAGE Publications, Inc.
- [10] Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government